



---

## Analisis Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pilkada Tahun 2024 di Lingkungan 13 Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan

Putri Farida Hanum Padang<sup>1</sup>, M. Faisal Husna<sup>2</sup>

PPKN, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [putrifaridahhanumpadang@umnaw.ac.id](mailto:putrifaridahhanumpadang@umnaw.ac.id)<sup>1\*</sup>, [m.faisalhusna@umnaw.ac.id](mailto:m.faisalhusna@umnaw.ac.id)<sup>2</sup>

---

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 15 Juni 2025, Article published: 29 Juni 2025

---

### ABSTRACT

Regional Head Elections (Pilkada) are a key component of local democracy, relying heavily on the performance of technical organizers at the polling station level, namely the Voting Organizing Group (KPPS). This study aims to analyze the performance of KPPS in Environment 13, Tegal Sari Mandala III Village, Medan Denai District, in carrying out the voting and vote-counting process. A descriptive qualitative approach was applied, using questionnaires, observation, and documentation as data collection techniques. Research informants included KPPS members, Bawaslu supervisors, witnesses, and security officers at eight polling stations. The findings show that KPPS performance was generally good, especially in terms of discipline, punctuality, and voter service. However, several obstacles remain, such as limited technical understanding, insufficient training, and physical fatigue due to heavy workloads. The implication of these findings highlights the need to improve the technical and managerial capacity of KPPS and to establish more effective and continuous training systems to ensure a fair and accountable electoral process

**Keywords:** KPPS, Regional Election, Performance, Voting, Voter Participation

### ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bagian dari demokrasi lokal yang sangat bergantung pada kinerja penyelenggara teknis di tingkat TPS, yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja KPPS di Lingkungan 13 Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai dalam menyelenggarakan proses pemungutan dan penghitungan suara. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa angket, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas anggota KPPS, Bawaslu, saksi, dan petugas ketertiban di delapan TPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja KPPS secara umum tergolong baik, terutama dalam aspek kedisiplinan, ketepatan waktu, dan pelayanan terhadap pemilih. Namun masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman teknis, pelatihan yang terbatas, serta kelelahan fisik akibat beban kerja tinggi. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas teknis dan manajerial KPPS serta perbaikan sistem pelatihan yang lebih efektif dan berkelanjutan guna menjamin kualitas pemilu yang adil dan akuntabel.

**Kata Kunci:** KPPS, Pilkada, Kinerja, Pemungutan Suara, Partisipasi Pemili

## PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bagian dari sistem demokrasi lokal yang memungkinkan rakyat secara langsung memilih pemimpin yang akan mengelola pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Mekanisme ini tidak hanya menjadi instrumen demokrasi prosedural, tetapi juga mencerminkan kedaulatan rakyat dalam menentukan arah pembangunan daerah. Pilkada yang berkualitas bergantung pada integritas, transparansi, dan profesionalitas penyelenggara, termasuk kelompok penyelenggara di tingkat terbawah, yakni Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Pilkada 2024 di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, menjadi momen penting bagi masyarakat dalam menentukan masa depan daerah. Namun demikian, partisipasi pemilih pemula masih cenderung rendah, dipengaruhi oleh minimnya pemahaman mengenai proses pemilu, kurangnya sosialisasi, dan keterbatasan akses terhadap informasi yang akurat. Situasi ini diperparah oleh sikap apatis atau golongan putih (golput), yang menunjukkan gejala menurunnya kepercayaan publik terhadap proses politik, termasuk terhadap para penyelenggara pemilu di lapangan.

Sebagai ujung tombak pelaksanaan pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPPS memegang peran vital dalam menjamin pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung tertib, adil, dan akuntabel. Tugas KPPS tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut pelayanan publik secara langsung kepada pemilih. Oleh karena itu, kinerja KPPS menjadi cerminan dari kapasitas negara dalam menyelenggarakan pemilu yang berintegritas. Kinerja yang buruk tidak hanya berisiko pada kesalahan teknis, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu secara keseluruhan.

Berbagai kajian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan yang sering dihadapi KPPS antara lain berkaitan dengan beban kerja yang tidak sebanding dengan kapasitas individu, pembagian tugas yang tidak profesional, kurangnya pelatihan teknis, serta intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam kontestasi politik. Pelanggaran administratif dan teknis selama proses pemungutan suara kerap kali disebabkan oleh kurangnya koordinasi, pemahaman terhadap prosedur, dan tekanan waktu yang tinggi. Situasi ini menggambarkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh KPPS dalam menjalankan perannya secara optimal.

Tidak hanya dari aspek teknis, kinerja KPPS juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial-politik yang melingkupinya, seperti hubungan dengan tokoh masyarakat, relasi klientelistik, dan kedekatan dengan peserta pemilu. Praktik-praktik seperti manipulasi hasil suara atau perubahan hasil pencoblosan sering kali terjadi sebagai akibat dari interaksi yang tidak profesional antara KPPS dengan lingkungan sosial-politik di sekitarnya. Oleh karena itu, penting untuk menilai kinerja KPPS tidak hanya dari segi prosedural, tetapi juga dari dimensi etika dan integritas dalam menjalankan tugas.

Dalam konteks Lingkungan 13 Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai, keberadaan KPPS menjadi krusial mengingat tingginya jumlah

pemilih aktif dan dinamika sosial yang kompleks. Kinerja KPPS di lingkungan ini tidak hanya mencerminkan pelaksanaan teknis Pilkada, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan edukasi politik dan efektivitas pengawasan pemilu oleh lembaga terkait. Berbagai permasalahan seperti ketepatan waktu pembukaan TPS, kesiapan logistik, kemampuan berkomunikasi dengan pemilih, dan netralitas anggota KPPS menjadi sorotan penting dalam evaluasi ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 di Lingkungan 13 Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Fokus utama penelitian diarahkan pada evaluasi terhadap aspek disiplin, tanggung jawab, pelayanan, serta kendala teknis dan non-teknis yang dihadapi KPPS dalam menjalankan tugasnya selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada pemahaman terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian dilaksanakan di Lingkungan 13 Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan, dengan partisipan yang terdiri dari anggota KPPS, Bawaslu, saksi, dan petugas ketertiban (Linmas) yang terlibat selama pelaksanaan Pilkada. Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lingkungan tersebut sebanyak delapan, dengan rincian masing-masing TPS terdiri dari satu orang Bawaslu, satu ketua KPPS, enam anggota KPPS, lima orang saksi, dan satu orang petugas Linmas. Seluruh partisipan memberikan persetujuan secara sukarela untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Variabel penelitian yang dikaji terdiri atas variabel independen dan dependen yang telah ditetapkan oleh peneliti. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi angket kuesioner, lembar observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket, observasi langsung di lapangan, dan pengumpulan dokumen terkait. Data yang diperoleh dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Lingkungan 13 Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, merupakan salah satu wilayah administratif yang memiliki tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi dengan karakteristik sosial ekonomi yang beragam. Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, tercatat sebanyak 732 pemilih aktif yang terdaftar di wilayah ini. Keberagaman demografis dan kepadatan hunian menjadikan wilayah ini sebagai lokus yang strategis dalam mengkaji efektivitas penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam hal keterlibatan petugas di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Penelitian ini melibatkan tujuh orang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), satu orang ketua KPPS, satu petugas pengawas TPS dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), satu orang petugas ketertiban (Linmas),

serta sejumlah saksi dari berbagai partai politik. Hasil observasi pada hari pemungutan suara menunjukkan bahwa KPPS telah melaksanakan tugasnya secara tertib dan sesuai jadwal, dengan pembukaan TPS yang dimulai tepat waktu. Pembagian tugas antaranggota KPPS berlangsung proporsional dan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan. Mayoritas pemilih menyampaikan kepuasan terhadap kinerja KPPS, terutama dalam hal kejelasan informasi, sikap ramah, dan kecepatan pelayanan selama proses pemungutan suara. Meski demikian, ditemukan kendala minor seperti keterlambatan kehadiran beberapa saksi partai.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan penyebaran angket, pelaksanaan tugas KPPS di Lingkungan 13 secara umum telah berjalan sesuai dengan pedoman operasional dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Seluruh tahapan, mulai dari persiapan logistik, pelayanan kepada pemilih, hingga proses penghitungan suara, dilakukan secara transparan dan akuntabel. Untuk memudahkan proses analisis, hasil kuantitatif dari angket yang dibagikan kepada para anggota KPPS telah dikompilasi dan dianalisis dalam bentuk narasi, menggantikan penyajian tabel yang sebelumnya digunakan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan gaya penulisan jurnal ilmiah yang lebih menekankan interpretasi dan konteks daripada sekadar penyajian data mentah.

Berdasarkan hasil angket yang diberikan kepada 50 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Lingkungan 13 Kelurahan Tegal Sari Mandala III, diperoleh skor kinerja dengan rentang nilai antara 51 hingga 70. Skor tertinggi sebesar 70 dicapai oleh seorang responden yang menunjukkan performa optimal dalam semua indikator angket, sedangkan skor terendah sebesar 51 mencerminkan adanya beberapa kekurangan signifikan, terutama pada aspek teknis dan ketepatan waktu pelaksanaan tugas. Secara keseluruhan, nilai rata-rata berada pada kisaran 62,6, dengan distribusi nilai mayoritas terkonsentrasi pada kategori sedang hingga tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota KPPS telah memahami dan menjalankan tugasnya dengan cukup baik sesuai pedoman teknis dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk dalam pembukaan TPS tepat waktu, pembagian logistik, serta pelayanan kepada pemilih yang ramah dan informatif.

Kinerja yang relatif baik ini juga ditunjukkan melalui konsistensi pelaksanaan prosedur pemungutan suara secara terbuka, kehadiran tepat waktu, serta kemampuan beradaptasi dalam menghadapi kendala teknis di lapangan. Meskipun demikian, masih ditemukan sejumlah anggota KPPS yang memiliki skor di bawah rata-rata, terutama yang baru pertama kali ditugaskan, dan belum memiliki pengalaman maupun pelatihan teknis yang memadai. Beberapa kelemahan teridentifikasi dalam aspek administrasi dan penguasaan teknologi informasi, khususnya dalam pengisian formulir dan rekapitulasi suara. Hasil ini mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas teknis melalui bimbingan teknis berkelanjutan dan pelatihan berbasis simulasi agar seluruh anggota KPPS dapat tampil lebih profesional, adaptif, dan akuntabel dalam menghadapi kompleksitas penyelenggaraan Pilkada ke depan.

Berdasarkan hasil angket yang diberikan kepada anggota KPPS, diperoleh nilai tertinggi 70 dan nilai terendah 51. Nilai ini mencerminkan tingkat pemahaman dan pelaksanaan tugas KPPS dalam menyukseskan proses Pilkada khususnya di TPS wilayah penelitian. Rentang nilai sebesar 19 poin menunjukkan adanya variasi antar individu dalam melaksanakan tanggung jawabnya, mulai dari kesiapan membuka TPS tepat waktu, pengelolaan logistik, hingga pelayanan kepada pemilih. Meskipun begitu, mayoritas nilai yang diperoleh responden berada pada kisaran sedang hingga tinggi, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar anggota KPPS telah menjalankan peran mereka dengan cukup baik.

Hal ini terlihat dari kesiapan KPPS dalam membuka TPS tepat waktu yaitu pukul 07.00, seluruh anggota KPPS menyiapkan segala logistik untuk Pemilu, memfasilitasi pemilih, serta melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara secara terbuka dan transparan dilihat langsung oleh seluruh saksi, bawaslu dan masyarakat setempat. Kinerja KPPS dalam konteks ini dapat dikaji melalui teori kinerja organisasi yang dikemukakan oleh Richard M. Steers (1985), yang menilai kinerja dari tiga dimensi utama, yakni efisiensi, efektivitas, dan adaptabilitas.

KPPS menunjukkan efisiensi dalam mengelola waktu dan sumber daya, efektivitas dalam melaksanakan prosedur dan mencapai target, pemungutan suara, namun masih terdapat kekurangan dalam aspek adaptabilitas, terutama terkait kemampuan menghadapi kendala teknis dan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pilkada.

Penelitian ini menemukan bahwa sebagian anggota KPPS masih belum memahami secara mendalam prosedur teknis, khususnya kepada anggota KPPS yang baru pertama kali ditunjuk, sehingga berdampak pada kelancaran tugas-tugas tertentu seperti proses rekapitulasi suara. Hal ini sejalan dengan temuan Wahyudi (2020) yang menyebutkan bahwa "Kinerja KPPS sering kali terhambat oleh minimnya pengalaman dan pelatihan yang kurang maksimal sebelum pelaksanaan pemungutan suara". Meskipun begitu, aspek disiplin kerja anggota KPPS tergolong tinggi karena sebagian besar hadir tepat waktu dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir. Dalam aspek integritas, tidak ditemukan indikasi keberpihakan atau pelanggaran etika oleh anggota KPPS, sebagaimana ditekankan oleh Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 bahwa KPPS harus bersifat independen, jujur, dan adil dalam menjalankan tugasnya. Faktor-faktor pendukung kinerja KPPS diantara adalah terselenggaranya bimbingan teknis dari pihak KPU, kerjasama dengan masyarakat yang kondusif serta tersedianya logistik secara lengkap dan tepat waktu.

Namun demikian, beberapa kendala yang dihadapi KPPS yaitu waktu pelatihan yang singkat, kurangnya supervisi langsung dari pengawas pemilu, dan keterbatasan penggunaan perangkat teknologi informasi bagi KPPS yang berusia lanjut. Secara keseluruhan kinerja KPPS di lingkungan 13 kelurahan Tegal Sari Mandala III dapat dikategorikan cukup baik namun masih memerlukan peningkatan dari sisi kompetensi teknis, manajerial, dan pemanfaatan teknologi agar mampu menghadapi dinamika pemilu yang semakin kompleks dan menuntut akuntabilitas tinggi dari seluruh penyelenggara.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Selain aspek teknis dan prosedur, hasil penelitian ini juga menyoroti pentingnya faktor non-teknis yang turut memengaruhi kinerja KPPS, seperti motivasi kerja, komunikasi antar anggota dan dukungan lingkungan sosial. Berdasarkan hasil angket dengan anggota KPPS dari peserta Pilkada diketahui bahwa semangat gotong royong dan kesadaran akan pentingnya demokrasi lokal menjadi dorongan utama dalam menjalankan tugas meskipun dengan keterbatasan yang ada.

Hal ini juga selaras dengan pendapat dari Robbins (2003) yang menyatakan bahwa “motivasi intrinsik dan lingkungan kerja yang suportif menjadi faktor penting dalam menentukan performa kerja individu dan kelompok”. Selain itu, kemampuan KPPS dalam menjalin komunikasi yang efektif, baik antar anggota maupun dengan pemilih, menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan suasana tertib dan kondusif di TPS. Namun beberapa anggota KPPS menyatakan bahwa tekanan waktu dan beban administrasi yang tinggi menyebabkan kelelahan fisik dan mental, terutama pada saat rekapitulasi suara yang berlangsung hingga malam hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun KPPS mampu melaksanakan tugas secara fungsional, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan aspek manajemen stres dan pembagian tugas yang lebih merata.

Dukungan dari masyarakat setempat juga menjadi aspek penting dalam menunjang kelancaran pemungutan suara, dimana para warga secara aktif membantu menertibkan antrian dan memberikan komsumsi secara swadaya, mencerminkan adanya hubungan sosial yang kuat antara penyelenggara dan pemilih. Penelitian ini juga mencatat bahwa kehadiran pengawas TPS turut meningkatkan kehati-hatian KPPS dalam setiap tindakan, sehingga meningkatkan akuntabilitas proses. Dengan demikian, meskipun terdapat sejumlah kendala internal dan eksternal, KPPS di lingkungan 13 mampu menyelesaikan seluruh tahapan pemungutan suara dengan tanggung jawab dan semangat kebersamaan yang tinggi, menunjukkan bahwa keberhasilan pemilu tidak hanya bergantung pada ketersediaan sarana, tetapi juga pada kualitas interaksi sosial dan etika kerja para penyelenggara.

### **Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pilkada Tahun 2024 di lingkungan 13 Kelurahan Tegal Sari Mandala III secara umum telah berjalan dengan sangat baik meskipun masih terdapat beberapa kendala di lapangan. Berdasarkan data angket dan observasi mayoritas anggota KPPS telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dari KPU, seperti membuka TPS tepat waktu, melayani pemilih dengan baik dan penghitungan suara yang terbuka dan transparan. Namun dengan demikian ada beberapa hambatan teknis tetap ditemukan, seperti keterlambatan pembagian formulir c6, kurangnya pemahaman bagi anggota KPPS baru, dan kelelahan fisik akibat kerja tinggi.

Dalam hal profesionalisme, sebagian besar anggota KPPS menunjukkan sikap disiplin dan netralitas, tetapi ada juga aspek kompetensi teknis masih perlu ditingkatkan, terkhusus dalam penguasaan teknologi informasi dan administrasi pemilu. Serta faktor pendukung yang memperkuat kinerja KPPS antara lain adalah adanya bimbingan teknis secara langsung dari KPU, tersedianya logistik tepat waktu, serta dukungan sosial dari masyarakat yang menciptakan suasana kondusif di TPS.

Sebaliknya, faktor penghambat mencakup waktu pelatihan yang singkat, tekanan administratif saat rekapitulasi suara, dan kurangnya pengalaman kerja pada sebagian anggota KPPS. Dan jika dianalisis menggunakan teori kinerja organisasi dari steers (1985), maka kinerja KPPS diukur dari segi efisiensi, efektivitas, dan adaptabilitas dapat dikatakan cukup baik, efisiensi dalam pelaksanaan waktu dan sumber daya, efektivitas dalam mencapai sasaran tahapan Pilkada, namun belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan teknologi dan prosedur baru. Selain itu, dari aspek hubungan sosial, KPPS dinilai mampu menjaga komunikasi yang baik antar anggota dan juga dengan masyarakat, sehingga partisipasi dan ketertiban pemilih tetap terjaga selama proses berlangsung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa KPPS di lingkungan 13 telah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, namun tetap memerlukan peningkatan dari sisi kompetensi teknis, manajemen, serta pemanfaatan teknologi agar dapat lebih adaptif dan profesional dalam menghadapi Pilkada mendatang.

## SIMPULAN

Kesimpulan, bahwa KPPS secara umum telah melaksanakan tugasnya dengan baik, terutama dalam aspek ketepatan waktu, pemahaman tugas, dan pelayanan kepada pemilih yang berlangsung secara tertib dan sesuai prosedur Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meski demikian, masih terdapat sejumlah kendala seperti keterbatasan pemahaman teknis oleh beberapa anggota KPPS, khususnya dalam menangani permasalahan administratif di Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta hambatan logistik seperti keterlambatan distribusi dan kurangnya alat bantu bagi pemilih disabilitas. Partisipasi masyarakat yang tinggi mencerminkan keberhasilan KPPS dalam membangun komunikasi, meskipun metode sosialisasi masih perlu ditingkatkan untuk menjangkau pemilih muda dan kelompok rentan. Beban kerja yang tinggi, waktu pelatihan yang terbatas, dan koordinasi yang belum optimal dengan pengawas TPS juga menjadi tantangan yang berdampak pada kualitas penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan sistem supervisi menjadi kebutuhan mendesak guna memperkuat profesionalisme KPPS dan menjamin integritas pelaksanaan demokrasi lokal di masa mendatang.

## DAFTAR RUJUKAN

Andrie Susanto, (2017). Disproporsionalitas Beban Tugas KPPS Studi Integritas Pemilu. *Jurnal Politik Indonesia* 2(1).

- 
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S (2014). *Model Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gorantokan, E. O. B. (2018). Kualitas Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Di Kabupaten Lembata Tahun 2014. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 7(2).
- Hadari Nawawi.(2005). *Penelitian Terapan*.Yogyakarta:Gajah Mada University Press.
- Husna, M. Faisal.( 2019). Antisipasi Hoax Bagi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019. *Jurnal Seminar Nasional Hasil Pengabdian Masyarakat*.
- . (2021). Bahaya Hoaks Bagi Pemilih Pemula dalam Pemilihan Walikota Binjai tahun 2020 pada masa pandemi covid 19 di SMK Swasta Setia Budi Binjai.
- . (2024).Meningkatkan Partisipasi Pemilu Pemula Dalam Pilkada Gubernur Dan Wali Kota Tahun 2024 Di Smas Al Ulum Medan. *Jurnal Masyarakat* : e-ISSN : 2809-8676 Volume 04 | Nomor 01.
- .(2025). Kesadaran dan Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pesta Demokrasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, e-ISSN : 2987-0135 Volume 2, no 12, Tahun 2025.
- Ulian Barus. (2024).Peran Pemilih Pemula Mencari Pemimpin Anti Korupsi SMA Negeri 2 Lubuk Pakam. *Jurnal Pengabdian Masyarakat* : e-ISSN :2580-0531 Volume 8, No 2
- Moehariono.( 2012). “Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rakmat, J (2016). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung Simbiosis Rekamata Media.
- Robbins (2016:260) “indikator kinerja adalah alat untuk mengukur sejauh mana pencapaian kinerja karyawan.
- Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Trianto. (2016). *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan Konsterktual*. Jakarta Kencana.
- Tri Reni Novita. (2021) Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 tahun 2018 Bagi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Walikota Binjai Tahun 2020 Masa Pandemi Covid 19 di SMK Swasta Setia Budi Binjai.

- . (2022). Antisipasi Hoaks Dalam Bermedia Sosial Bagi Siswa SMK Negeri 1 Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
- Rakmat, J (2016). Metode Penelitian Komunikasi. Bandung Simbiosis Rekamata Media